

**PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BATAM**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batam, 31 Desember 2023
Kepala Pangkalan,

Turman Hardiyanto Maha
NIP. 19711231999031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
Lampiran dan Daftar	x

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BATAM**

*Jembatan II Bareleng, Pulau Setokok, Bulang, Pulau Setokok, Batam, Kota
Batam, Kepulauan Riau*

(0778) 4091808 Email : psdkp.batam@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Batam, Desember 2023
Kepala Pangkalan,

Tusman Hardianto Maha S.P MMP
NIP. 19711231999031001

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,481,583,851 atau mencapai 335,35 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 740,000,000.

Realisasi Belanja Negara pada Laporan TA 2023 adalah sebesar Rp 61,067,454,707 atau mencapai 99,93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 61,109,681,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada TA 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp122,000,554,288 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1,157,858,762; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp120,842,695,526 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp56,722,910 dan Rp121,943,831,378.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2,471,289,962 sedangkan jumlah beban dari

kegiatan operasional adalah sebesar Rp68,305,058,728 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp65,833,768,766), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp101,220,311) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 65,934,989,077)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp128,944,174,846 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp65,934,989,077) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 388,680,745 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp58,545,964,864 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 121,943,831,378.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	740.000.000	2.481.583.851	335,35	58.780.259
JUMLAH PENDAPATAN		740.000.000	2.481.583.851	335,35	58.780.259
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	11.229.025.000	11.226.144.634	99,97	11.009.548.449
Belanja Barang	B.4	46.525.700.000	46.486.730.573	99,92	35.665.986.229
Belanja Modal	B.5	3.354.956.000	3.354.579.500	99,99	6.260.067.470
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		61.109.681.000	61.067.454.707	99,93	52.935.602.148

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM NERACA 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	4.818.750	4.818.750
Uang Muka Belanja	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	1.153.040.012	1.133.102.139
Jumlah Aset Lancar		1.157.858.762	1.137.920.889
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	34.323.074.719	34.323.074.719
Peralatan dan Mesin	C.16	100.348.718.058	95.071.140.046
Gedung dan Bangunan	C.17	37.770.160.640	38.585.284.356
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	39.186.824.575	39.037.038.575
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	0	85.287.400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(90.786.082.466)	(79.467.361.718)
Jumlah Aset Tetap		120.842.695.526	127.634.463.378
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	0	1.267.919.423
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	0	(1.058.709.169)
Jumlah Aset Lainnya		-	209.210.254
JUMLAH ASET		122.000.554.288	128.981.594.521
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	56.722.910	37.419.675
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.28	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.29	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.30	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.31	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		56.722.910	37.419.675
JUMLAH KEWAJIBAN		56.722.910	37.419.675
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	121.943.831.378	128.944.174.846
JUMLAH EKUITAS		121.943.831.378	128.944.174.846
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		122.000.554.288	128.981.594.521

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.471.289.962	48.417.600
JUMLAH PENDAPATAN		2.471.289.962	48.417.600
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.226.144.634	11.009.548.449
Beban Persediaan	D.3	343.862.848	516.187.537
Beban Barang dan Jasa	D.4	36.741.334.498	25.966.143.224
Beban Pemeliharaan	D.5	6.230.101.962	6.876.317.511
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.701.778.447	2.889.331.299
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	10.061.836.339	9.034.359.753
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		68.305.058.728	56.291.887.773
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(65.833.768.766)	(56.243.470.173)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	(101.990.311)	4.712.734
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		9.523.889	9.553.671
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		111.514.200	4.840.937
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		770.000	808.988
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		770.000	808.988
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(101.220.311)	5.521.722
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(65.934.989.077)	(56.237.948.451)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(65.934.989.077)	(56.237.948.451)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BATAM****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	128.944.174.846	126.330.270.143
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-65.934.989.077	-56.237.948.451
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	388.680.745	(5.360.641.037)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	388.680.745	(5.360.641.037)
KOREKSI REKLASIFIKASI	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	58.545.964.864	64.212.494.191
EKUITAS AKHIR	E.5	121.943.831.378	128.944.174.846

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 571 yang meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pangkalan PSDKP Batam berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2022 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 22 Januari 2022, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

Aset Tetap

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pangkalan Pengawasan SDKP Batam* telah mengadakan 13 (dua belas) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Ada 4 perubahan (Revisi) DIPA pada TA 2023 yaitu:

Revisi DIPA	Tanggal	Nomor	Stamp	Nilai Anggaran
1	27-12-2022	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:4206-5456-7505-4093	62.686.869.000
2	21-02-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:1449-0163-0099-7183	62.686.869.000
3	18-04-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:1449-0163-0099-7183	62.686.869.000
4	05-05-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:1449-0163-0099-7183	62.686.869.000
5	19-07-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:9201-4401-4149-8794	60.818.101.000
6	15-10-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:1105-9320-9070-6838	60.583.939.000
7	19-10-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:6569-0037-4061-0761	58.894.729.000
8	27-10-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:3738-4862-7700-1207	58.894.729.000

9	01-11-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:11 14-8225-8857-2891	60.971.531.000
10	30-11-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:52 74-8104-0006-6500	61.109.681.000
11	12-12-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:52 74-8104-0006-6500	61.109.681.000
12	27-12-2023	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:52 74-8104-0006-6500	61.109.681.000
13	18-01-2024	SP DIPA-032.05.2.325156/2023	DS:52 74-8104-0006-6500	61.109.681.000

- Revisi DIPA ke 01 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 27 Desember 2022, kode Digital Stamp (DS) : 4206-5456-7505-4093 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp62.686.869.000. Revisi tersebut merupakan revisi DJA untuk Alokasi Blokir Auto Adjusment senilai Rp. 3.162.046.000.
- Revisi DIPA ke 02 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 21 Februari 2023, kode Digital Stamp (DS) :1449-0163-0099-7183 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp62.686.869.000. Revisi tersebut merupakan revisi DIPA untuk Buka Blokir Anggaran Kendaraan Roda 2 Senilai Rp. 34.000.000.
- Revisi DIPA ke 03 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 18 April 2023, kode Digital Stamp (DS) :1449-0163-0099-7183 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp62.686.869.000. Revisi tersebut merupakan Pemutakhiran Halaman III DIPA
- Revisi DIPA ke 04 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-

032.05.2.325156/2023 Tanggal 05 Mei 2023, kode Digital Stamp (DS) :1449-0163-0099-7183 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp62.686.869.000. Revisi tersebut merupakan Penambahan Blokir Auto Adjustment senilai Rp. 180.400.000

- Revisi DIPA ke 05 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 19 Juli 2023, kode Digital Stamp (DS) : 9201-4401-4149-8794 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp60.818.101.000. Revisi tersebut merupakan Pergeseran Anggaran Senilai Rp. 215.532.000 ke Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai tindak lanjut perpindahan Aset berupa Speedboat Baramundi 01, Pergeseran Anggaran Senilai Rp. 1.653.236.000 ke Seditjen PSDKP Untuk Mendukung Penyelesaian penyelesaian Multi Years Contract Pengadaan Kapal Pengawas.
- Revisi DIPA ke 06 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 15 Oktober 2023, kode Digital Stamp (DS) : 1105-9320-9070-6838 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp60.583.939.000. Revisi tersebut merupakan Pergeseran Anggaran Senilai Rp. 234.162.000 ke Seditjen PSDKP Untuk Penyelesaian penyelesaian Multi Years Contract Pengadaan Kapal Pengawas, Pergeseran anggaran pada jenis belanja pegawai Rp. 182.220.000 ke belanja bahan untuk mendukung kegiatan Penanganan Perkara TPKP.
- Revisi DIPA ke 07 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 19 Oktober 2023, kode Digital Stamp (DS) : 6569-0037-4061-0761 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp58.894.729.000. Revisi tersebut merupakan Pergeseran Blokir Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang tidak sesuai peruntukan Senilai Rp. 1.689.210.000 ke Seditjen PSDKP.
- Revisi DIPA ke 08 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 27 Oktober 2023, kode Digital Stamp (DS) : 3738-4862-7700-1207 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp58.894.729.000. Revisi tersebut merupakan Pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai (51) ke Belanja Barang (52) sebesar Rp. 132.375.000 dalam rangka mendukung operasional perkantoran Pangkalan PSDKP Batam.

- Revisi DIPA ke 09 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 1 November 2023, kode Digital Stamp (DS) : 1114-8225-8857-2891 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp60.971.531.000. Revisi tersebut merupakan Pergeseran Anggaran yang berasal dari buka blokir (ABT) yang tidak sesuai peruntukan Senilai Rp. 2.076.802.000 dari Sesditjen PSDKP dan Unit Eselon I Lainnya untuk mendukung operasional Kapal Pengawas.
- Revisi DIPA ke 10 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 30 November 2023, kode Digital Stamp (DS) : 5274-8104-0006-6500 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp61.109.681.000. Revisi tersebut merupakan Pergeseran Anggaran Senilai Rp.138.150.000 dari Stasiun PSDKP Biak pada kegiatan Perkara TPKP Sedang yang Ditangani.
- Revisi DIPA ke 11 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 12 Desember 2023, kode Digital Stamp (DS) : 5274-8104-0006-6500 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp61.109.681.000. Revisi tersebut merupakan Pemutakhiran Revisi POK untuk alokasi Belanja Pegawai.
- Revisi DIPA ke 12 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 27 Desember 2023, kode Digital Stamp (DS) : 5274-8104-0006-6500 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp61.109.681.000. Revisi tersebut merupakan Pemutakhiran Revisi POK untuk alokasi GUP dan TUP Nihil.
- Revisi DIPA ke 13 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 Tanggal 27 Desember 2023, kode Digital Stamp (DS) : 5274-8104-0006-6500 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp61.109.681.000. Revisi tersebut merupakan Pemutakhiran POK pada Revisi Pagu Minus.

Realisasi
Pendapatan
Rp2,481,583,851

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2,481,583,851 atau mencapai 335,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 740,000,000. Pendapatan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Denda Lainnya	740.000.000	2.419.402.157	326,95%
Pendapatan Penjualan Alsln	-	9.523.889	100,00%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		48.406.008	100,00%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		3.481.797	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	-	770.000	100,00%
Jumlah	740.000.000	2.481.583.851	335,35%

Adapun Rincian Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pengembalian Pembayaran Uang makan Desember yang sudah dibayarkan di bulan Desember 2022 a.n Reza Puspita Widagdo, dengan no NTPN E6E5F55DEVS8HERL tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp770,000,000 dimana pegawai sudah mengundurkan diri per Desember 2022.
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 2 unit Perahu Karet dan 1 Unit Primary Surveillance Radar dengan Risalah Lelang no RL 57/11/2023 Tanggal 2 Februari 2023 dengan NTPN 14C9261QUQB8NVQK Senilai Rp. 755,000 tanggal 4 Februari 2023.
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 1 (satu) Paket Peralatan Selam dengan Risalah Lelang no RL 7/16/2023 Tanggal 18 Januari 2023 dengan NTPN A28F38N3E9VVAIEH Senilai Rp. 1,845,000 Tanggal 20 Januari 2023

4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 808/11/2023 tanggal 14 November 2023 dengan NTPN 9F6232G4VGSTAJ0A tanggal 15 November 2023 senilai Rp600,000.
5. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 2 unit papan nama, 2 unit mesin absensi, 1 unit infocus, 2 unit tempat tidur besi, 8 unit ac split, 1 unit alat dapur, 1 unit HT, 1 unit alat komunikasi radio, 3 unit laptop, 3 unit tablet pc, 4 unit printer, 2 unit modem dengan no RL 1163/14/2023 tanggal 28 November 2023 dengan NTPN 3035961QUR6RTLM2 tanggal 29 November 2023 senilai Rp3,700,000
6. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 479/16/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan NTPN BA86E48VV64C8VBE tanggal 5 Desember 2023 senilai Rp1,055,999
7. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 1283/13/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan NTPN 963E01JNFMD8A2N5 tanggal 7 Desember 2023 senilai Rp1.567.890
8. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Januari 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 9B89261QUQF2OQ8G tanggal 31 Maret 2023.
9. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Februari 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN F945F55DF01P1NB3 tanggal 1 Mei 2023
10. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Maret 2023 senilai Rp.3,522,950 dengan no NTPN D2A4C48VV5G28LU6 tanggal 24 Mei 2023.

11. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan April 2023 senilai Rp.3,778,392 dengan no NTPN 9027F55DF04S3MKT tanggal 5 Juni 2023.
12. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 378,444,968 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif Kepada PT. Pulau Bawah dengan nomor Surat B.290/DJPSDKP/PW.240/IV/2023 tanggal 10 April 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 6BC1A6U8EL3RJ1ER Tanggal 12 April 2023.
13. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 181,116,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Bintang TJandra Makmur dengan nomor Surat B.466/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 658090N9VR94KOKG Tanggal 12 Juni 2023.
14. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 202,272,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Hasil Laut dengan nomor Surat B.464/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 3265E48VV5IM8MO0 Tanggal 12 Juni 2023.
15. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 160,734,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Maju Jaya Bersama dengan nomor Surat B.465/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 9BFD37QLUFS7SKQ8 Tanggal 12 Juni 2023.

16. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 136,998,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Apel Hijau dengan nomor Surat B.463/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 658090N9VR94KOKG Tanggal 12 Juni 2023.
17. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 190,404,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Apel Hijau 8 dengan nomor Surat B.476/DJPSDKP/PW.110/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN FD8BB0N9VR95NC42 Tanggal 13 Juni 2023.
18. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 58,815,010 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT. Utama Resort Batam dengan nomor Surat B.479/DJPSDKP/PW.230/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN B61118N3EAEMG2C1 Tanggal 15 Juni 2023.
19. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp65,895,390 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Tri Tunas Unggul dengan nomor Surat B.700/DJPSDKP/PW .230/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 5BBFA7QLUFV9074L Tanggal 14 Juli 2023.
20. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Mei 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 6F8353CIFB3FORM7 tanggal 18 Juli 2023.
21. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juni 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN DF0121JNFM1HU655 tanggal 14 Agustus 2023.

22. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp271,064,666 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT. Dirgantara Inti Abadi dengan nomor Surat B.764/DJPSDKP/PW .210/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN E1F390N9VRF08LLS Tanggal 15 Agustus 2023.
23. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 89,583,528 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Indo Asean dengan nomor Surat B.811/DJPSDKP/PW .230/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 7A0FB3CIFB6LIHML Tanggal 26 Agustus 2023.
24. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 323,647,555 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Tritunas Sinar Benua dengan nomor Surat B.798/DJPSDKP/PW .210/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 6FFEB2G4VGK6SIU4 Tanggal 28 Agustus 2023.
25. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp3,481,797, Telah dibayarkan dengan no SP2D 231371301005706 Tanggal 31 Agustus 2023 dan SPM No 593. Berupa denda keterlambatan Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Kapal Pengawas sesuai BAST no BA.2388/PSDKPLan.2/PL.430/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 BAP no BA.2389/PSDKPLa n.2/PL.430/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp.348,179,694 kepada CV.Spectra Gemilang.

26. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 45,309,600 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada Budiyanto dengan nomor Surat B.776/DJPSPDKP/PW .240/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 744A47QLUG52CRTE Tanggal 12 September 2023. Bukti penerimaan Negara Denda Administratif a.n Budiyanto sebelum nya di bayarkan dengan akun 425629 dikarenakan akun penerimaannya salah, maka telah dikoreksi menjadi akun 425839 dengan Nota koreksi no 137/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023
27. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juli 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN CAD863CIFB98L35J tanggal 13 September 2023.
28. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 27,000,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM.TIRTA BAKTI dengan nomor Surat B.944/DJPSPDKP/PW .110/VIII/2023 tanggal 29 September 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 8725548VV5S44KI0 Tanggal 29 September 2023.
29. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Agustus 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN EFA9561QUR3GPG2B tanggal 16 Oktober 2023.
30. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan September 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 9A95D55DF0JPPMAV tanggal 6 November 2023.
31. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Oktober 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN B42178N3EATK58SP tanggal 15 November 2023.
32. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan November 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN FCA9461QUR9BP5HI tanggal 12 Desember 2023.

33. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Desember 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 335FA61QUR9D0U26 tanggal 14 Desember 2023.
34. Pendapatan dari Sewa Rumah Pendapatan dari sewa tanah,Gedung dan bangunan Bulan Maret dan April 2023 (kamar kosong) senilai Rp.766,326 dengan no NTPN A19CD8N3EB0I8OV7 tanggal 14 Desember 2023.
35. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 20,000,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM SETIAWAN II dengan nomor Surat B.928/DJPSDKP/PW .320/IX/2023 tanggal 22 September 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 5AF836U8ELJ72N9N Tanggal 22 September 2023.
36. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp181,924,800 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Pulau Bintang Emas dengan nomor Surat B.1017/DJPSDKP/PW.210/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN E01551JNFM7QKGO9 Tanggal 26 Oktober 2023.
37. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 86,192,640 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Hasil Lautan dengan nomor Surat B.1180/DJPSDKP/PW.110/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 0EB9955DF0N4RQQP Tanggal 18 Desember 2023.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi TA 2023 adalah sebesar Rp 61,067,454,707 atau 99,93% dari anggaran belanja sebesar Rp60,818,101,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Realisasi Belanja
Negara
Rp61,067,454,707*

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.229.025.000	11.226.144.634	99,97
Belanja Barang	46.525.700.000	46.486.730.573	99,92
Belanja Modal	3.354.956.000	3.354.579.500	99,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	61.109.681.000	61.067.454.707	99,93

Dibandingkan dengan TA 2022, realisasi belanja TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 15,36% dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. realisasi belanja Pegawai Mengalami kenaikan 1,97 %, disebabkan ada tambahan Pegawai P3K sebanyak 12 orang dan mulai dibayarkan belanja pegawainya di bulan agustus 2023.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami Kenaikan 30,34 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh Naiknya realisasi belanja Barang disebabkan Belanja Bahan Berupa BBM Kapal mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50,43 % pada Tahun 2023. Dan Belanja Peemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 106,61 % pada Tahun 2023. Menurunnya realisasi belanja modal disebabkan Anggaran Realisasi Belanja Modal TA 2023 lebih sedikit Anggaran Belanja Modal TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI S1 TA 2023	REALISASI S1 TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.226.144.634	11.009.548.449	1,97
Belanja Barang	46.486.730.573	35.665.986.229	30,34
Belanja Modal	3.354.579.500	6.260.067.470	(46,41)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	61.067.454.707	52.935.602.148	15,36

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp 11,226,144,634*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11,226,144,634 dan Rp11,009,548,449. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 Realisasi diperuntukkan ASN Pangkalan PSDKP Batam yang berjumlah 102 orang Belanja pegawai TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 1,97 persen dari TA 2022. disebabkan ada tambahan Pegawai P3K sebanyak 12 orang dan mulai dibayarkan belanja pegawainya di bulan agustus 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gai Pokok PNS	3.955.628.700	3.977.683.184	(0,55)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	64.561	73.404	(12,05)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	339.151.580	335.698.994	1,03
Belanja Tunj. Anak PNS	106.935.500	101.447.327	5,41
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.940.000	23.220.000	3,10
Belanja Tunj. Fungsional PNS	145.670.000	149.300.000	(2,43)
Belanja Tunj. PPh PNS	1.264.300	1.287.475	(1,80)
Belanja Tunj. Beras PNS	290.186.940	292.456.340	(0,78)
Belanja Uang Makan PNS	380.063.000	424.095.000	(10,38)
Belanja Tunjangan Umum PNS	149.085.000	153.985.000	(3,18)
Belanja Uang Lembur	249.786.000	266.105.000	(6,13)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.170.363.699	5.286.436.842	(2,20)
Belanja Gaji Pokok PPPK	145.968.000	0	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.547	0	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.108.400	0	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.359.728	0	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.400.000	0	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.007.840	0	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	20.160.000		
Belanja Uang Lembur PPPK	16.557.000		
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	195.300.798		
Jumlah Belanja Kotor	11.229.003.593	11.011.788.566	1,97
Pengembalian Uang Makan PNS	-388.500	-74.000	425,00
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji	-1.089	-6.047	(81,99)
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	-255.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Tunj. Kinerja	-153.410	-1.905.070	(91,95)
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-2.315.960		
Jumlah Belanja	11.226.144.634	11.009.548.449	1,97

Adapun penjelasan Pengembalian belanja pegawai di TA 2023 yaitu: Pengembalian Uang Makan senilai Rp388,500, Pengembalian Tunj. Senilai Rp153,410 dan Pengembalian Pembulatan senilai Rp1,089 Serta Pengembalian Tunjangan Suami/Istri senilai Rp2,315,960.

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai TA 2023 yaitu

1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunj. Bulan Agustus 2023 a.n Turman Hardianto Maha senilai Rp.141,074
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunj. Bulan Agustus 2023 a.n Fabriansyah Adrianto Senilai Rp 330
3. Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2023 an Budi Santoso Senilai Rp.12,006

4. Pengembalian Tunjangan Istri bulan Februari-Juni 2023 a.n Ardiansyah Kurniawan Senilai Rp1,521,800
5. Pengembalian Tunjangan Istri bulan Oktober-Desember 2023 a.n Frando Pangkey Senilai Rp794,160
6. Pengembalian Uang Makan Bulan Maret 2023 1 Hari a.n Seivo Grevo Wewengkang senilai Rp37,000
7. Pengmbalian Belanja Pegawai uang makan pns bulan maret 2023 atas nama Tri Cahyono Senilai Rp351,500

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp46,486,730,573*

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp46,486,730,573 dan Rp35,665,986,229. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami Kenaikan 30,34 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh Naiknya realisasi belanja Barang disebabkan Belanja Bahan Berupa BBM Kapal mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50,43 % pada Tahun 2023. Dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 106,61 % pada Tahun 2023. Beban jasa lainnya senilai Rp494.234.800,00 yang merupakan jasa angkut BBM, medical cek up, service perlengkapan alat keselamatan, honor ahli kasus TPKP penyidikan, pembayaran PJLP.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	3.563.838.962	3.517.024.927	1,33
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	254.077.000	206.198.500	23,22
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.796.550	27.331.300	(64,16)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	257.360.000	253.920.000	1,35
Belanja Operasional Lainnya	547.487.000	207.614.000	163,70
Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	0	51.200.000	(100,00)
Belanja Bahan	28.377.828.357	18.864.337.275	50,43
Belanja Honor Output Kegiatan	102.010.000	99.190.000	2,84
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.640.438.360	1.110.125.100	47,77
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi C	0	0	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	325.992.548	300.365.501	8,53
Belanja Langganan Listrik	688.674.475	713.332.335	(3,46)
Belanja Langganan Telepon	230.077.292	230.220.995	(0,06)
Belanja Langganan Air	158.108.767	104.947.138	50,66
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.398.700	10.979.300	(41,72)
Belanja Jasa Konsultan	99.925.000	-	100,00
Belanja Sewa	257.005.000	177.325.000	44,93
Belanja Jasa Profesi	35.110.000	40.700.000	(13,73)
Belanja Jasa Lainnya	494.234.800	299.171.000	65,20
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	0	47.079.000	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	399.581.750	144.435.000	176,65
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.220.555.121	2.042.804.849	106,61
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Me	977.422.584	4.291.225.710	(77,22)
Beban pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.617.900	8.190.000	41,85
Belanja Pemeliharaan Jaringan	127.750.960	28.938.000	341,46
Belanja Perjalanan Biasa	2.875.369.245	2.203.356.683	30,50
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	435.777.000	299.826.000	45,34
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	293.532.202	256.323.500	14,52
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-1	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	97.100.000	129.825.116	(25,21)
Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	-168.000	0	(100,00)
Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-171.000	0	(100,00)
Jumlah Belanja	46.486.730.573	35.665.986.229	30,34

Rincian Pengembalian Belanja Barang Yaitu :

1. Pengembalian Belanja Barang Honor Penanggung Jawab UAKPA Bulan Februari Tahun 2023 senilai Rp 171,000
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN Bulan November 2023 3 Hari (1,3,6 November 2023) a.n Iwan Setyoko Senilai Rp.168,000

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp3,354,579,500*

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,354,579,500 dan Rp6,260,067,470,. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 46,41% dibandingkan TA 2022 dikarena Menurunnya realisasi belanja modal disebabkan Anggaran Realisasi Belanja Modal TA 2023 lebih sedikit Anggaran Belanja Modal TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.351.500	454.191.650	67,41
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Als	0	0	0,00
Belanja Modal Jaringan	149.786.000	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Alsin	2.444.442.000	5.805.875.820	(57,90)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.354.579.500	6.260.067.470	-46,41

- *Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pangkalan PSDKP Batam TA 2023 Senilai Rp760,351,500 berupa :*

Nama Barang	Jumlah	Nilai
A.C. Split	2	9064000
Air Conditioning (AC)	2	6536000
Tablet PC	1	7790000
Personal Computer	1	12197000
GPS	1	12765000
Senter	1	16539000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2530000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	20700000
Blower	1	6549000
Pompa Air	2	12543000
Personal Komputer Lainnya	2	26670000
Peralatan Las Listrik	1	4329000
Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	1	5439000
Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	3	19647000
A.C. Split	3	10566750
Lampu Emergency	1	10101000
Pompa Celup	3	16983000
Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	9	39627000
Secondary Surveillance Radar	2	297300000
Komputer Unit Lainnya	8	87760000
Sepeda Motor	2	37820000
Personal Computer	2	28120000

Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	18800000
Bracket Standing Peralatan	2	4017000
Televisi	1	3193000
Camera Video	1	15760000
Air Conditioning (AC)	2	14298750
Microphone/Wireless MIC	1	2987000
GPS	1	9720000
JUMLAH		760351500

- *Realisasi Belanja Modal Jaringan Berupa Belanja Modal Jaringan Listrik Darat Senilai Rp149.786.000 dengan BAST No.1707/PPK/PSDKP.Lan2/2023*
- *Realisasi Belanja Penambahan Nilai Alsin berupa Repowering Senilai Rp2,444,442,000
SP.1838/PPK/PSDKPLan.2/PL.421/VI/2023Pekerjaan Repowering Speedboat Pengawas Napoleon 027*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .Hal ini disebabkan ada tidak ada pengadaan tanah pada TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp3,204,793,500*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3,204,793,500 dan Rp 6,260,067,470. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 48,81 % persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 disebabkan Menurunnya realisasi belanja modal disebabkan Anggaran Realisasi Belanja Modal TA 2023 lebih sedikit Anggaran Belanja Modal TA 2023.

perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	760.351.500	454.191.650	67,41
Belanja Modal Perencanaan dan Pe	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Alsintan	2.444.442.000	5.805.875.820	-57,90
Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.204.793.500	6.260.067.470	-48,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	3.204.793.500	6.260.067.470	-48,81

- *Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pangkalan PSDKP Batam TA 2023 Senilai Rp760,351,500 berupa :*

Nama Barang	Jumlah	Nilai
A.C. Split	2	9064000
Air Conditioning (AC)	2	6536000
Tablet PC	1	7790000
Personal Computer	1	12197000
GPS	1	12765000
Senter	1	16539000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2530000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	20700000
Blower	1	6549000
Pompa Air	2	12543000
Personal Komputer Lainnya	2	26670000
Peralatan Las Listrik	1	4329000
Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	1	5439000
Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	3	19647000
A.C. Split	3	10566750
Lampu Emergency	1	10101000
Pompa Celup	3	16983000
Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	9	39627000
Secondary Surveillance Radar	2	297300000
Komputer Unit Lainnya	8	87760000
Sepeda Motor	2	37820000
Personal Computer	2	28120000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	18800000
Bracket Standing Peralatan	2	4017000
Televisi	1	3193000
Camera Video	1	15760000
Air Conditioning (AC)	2	14298750
Microphone/Wireless MIC	1	2987000
GPS	1	9720000
JUMLAH		760351500

- *Realisasi Belanja Penambahan Nilai Alsin berupa Repowering Senilai Rp2,444,442,000 SP.1838/PPK/PSDKPLan.2/PL.421/VI/2023Pekerjaan Repowering Speedboat Pengawas Napoleon 027*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rp 0

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan	0	0	0,00%
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00%
Pengembalian Belanja Modal		-	
Jumlah Belanja	0	0	0,00%

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Rp149,786,000

Realisasi Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 149,786,000 dan Rp0. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Rp149,786,000 berupa • Realisasi Belanja Modal Jaringan Berupa Belanja Modal Jaringan Listrik Darat Senilai Rp149.786.000 dengan BAST No.1707/PPK/PSDKP.Lan2/2023

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0

Realisasi Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0* Realisasi Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Mutasi Tambah :		
Kas di Brankas	-	-
Kas di Rekening	-	-
BP UM (Voucher)	-	-
BP BPP	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
Saldo Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 157,500 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.4 Piutang PNB/Piutang Lainnya

*Piutang
PNBP/Piutan
g Lainnya
Rp0*

Saldo Piutang PNB/Piutang Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian
Lancar TPA
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka
Rp4,818,750*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 4,818,750 dan Rp4,818,750. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar dimuka di TA 2022 sudah di jurnal balik di TA 2023.

Ada pun rincian Belanja dibayar di muka TA 2023 yaitu:

1. Belanja Sewa Kantor Operasional di Pos Belakang Padang PSDKP Batam senilai Rp.19,275,000 dan telah dibayarkan secara penuh, masa berlaku perjanjian sewa 1 April 2023 s/d 31 Maret 2024. Belanja dibayar dimuka senilai $3/12 \times \text{Rp } 19,275,000 = \text{Rp}4,818,750$,

C.9 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo uang muka belanja per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka Belanja (Prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.11 Persediaan

*Persediaan
Rp1,153,040,012*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1,153,040,012 dan Rp 1,133,102,139

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	18.364.000	17.449.500
Suku Cadang	1.134.676.012	1.115.652.639
Bahan Baku (BBM)	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.153.040.012	1.133.102.139

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp18,364,000 Suku Cadang Senilai Rp1,134,676,012. Untuk rincinan persediaan terlampir. Adapun rincian Mutasi Tambah dan Kurang Persediaan yaitu:

Saldo Nilai Persediaan per 31 Desember 2022	1.133.102.139
Mutasi tambah:	
Pembelian Barang Konsumsi	343.227.348,
Pembelian Suku Cadang	957.697.784
Reklasifikasi Masuk Barang Konsumsi	1.555.064
Reklasifikasi Masuk Suku Cadang	27.219.060
Perolehan Lainnya	530.981.820
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar Suku Cadang	(26.279.060)
Reklasifikasi Keluar Barang Konsumsi	(915.064)
Beban Persediaan Konsumsi	(342.952.848)
Beban Persediaan suku cadang	(1.470.596.231)
Saldo per 31 Desember 2023	1.153.040.012

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Persediaan 31 Desember 2022(Saldo Awal 2023)	1.133.102.139
Pembelian persediaan konsumsi	343.227.348
Pembelian Suku Cadang	957.697.784
Reklasifikasi Masuk	28.774.124
Perolehan Lainnya	530.981.820
Total Realisasi Persediaan	2.993.783.215
Beban Persediaan konsumsi	342.952.848
Beban persediaan suku cadang	1.470.596.231
Reklasifikasi Keluar	27.194.124
Total beban persediaan	1.840.743.203
Selisih	1.153.040.012
Neraca 31 Desember 2023	1.153.040.012
Selisih	-
Klarifikasi selisih	Nilai
Beban penyesuaian nilai persediaan	-
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-
Klarifikasi selisih beban persediaan	-

Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2023

Saldo Awal per 1 Januari 2023 (31 Desember 2022 Audited)		1.133.102.139
MUTASI TAMBAH		
M01	Saldo Awal	0
M02	Pembelian	1.300.925.132
M06	Perolehan Lainnya	530.981.820
M10	Reklasifikasi Masuk	28.774.124
M11	Reklasifikasi Dari Aset	0
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	0
P01	Hasil Opname Fisik	0
MUTASI KURANG		
K01	Habis Pakai	-1.813.549.079
K10	Reklasifikasi Keluar	-27.194.124
K11	Reklasifikasi ke Aset	0
K9B	Koreksi Nilai Kurang	0
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	0
Saldo Akhir		1.153.040.012

Mutasi tambah pada transaksi persediaan meliputi transaksi

(1) penambahan saldo awal; Senilai Rp 0

(2) pembelian; Senilai Rp1.300.925.132 berupa Pembelian Barang Konsumsi senilai Rp343,227,348 dan Pembelian Suku cadang senilai Rp957,697,784

(3) transfer masuk; Senilai Rp0

(4) hibah masuk; Senilai Rp0

(5) perolehan lainnya; Senilai Rp530,981,820 Penjelasan rinci atas transaksi tersebut yaitu selama periode 31 Desember 2023 terdapat Perolehan Lainnya (M06) pada Satker Pangkalan PSDKP Batam berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : B. 1503/PSDKPLan.2/PL.750/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap dan Persediaan Nomor : B.1503/PSDKPLan.2/PL.750/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, Berita Acara Serah Terima Suku Cadang Nomor : BA.1152/PSDKPLan.2/PL.430/V/2023 tanggal 3 Mei 2023.

6) reklasifikasi masuk; senilai Rp28.774.124 berupa

NAMA BARANG	KUANTI TAS	HARGA (RP)	NILAI (RP)
Materai_BKA 6/3/23	20 buah	10,000	200,000
MATERAI_HIU 3 28/3/23	20 PCS	11,000	220,000
AMPLOP COKLAT_NTN 24/3/23	1 PACK	38,000	38,000
MATERAI_HMC 5 9/5/23	20 PCS	11,000	220,000
PAPER CLIP WARNA_HIU 3 17/7/23	4 KOTAK	6,000	24,000
MAGNET DINDING_HMC 5 12/8/23	6 KOTAK	12,000	72,000
FILTER WATER_BKA 26/9/23	2 PCS	170,000	340,000
FILTER SUB WATER_BKA 26/9/23	2 PCS	300,000	600,000
LUCAS RELAY 4 PIN_LS HIU 17 11/9/23	3 UNIT	482,850	1,448,550
FUEL FILTER 34462- 00300_LS HMC 5 11/9/23	3 UNIT	522,810	1,568,430
OIL FILTER 32A40- 00400_LS HMC 5 11/9/23	3 UNIT	456,210	1,368,630

AIR FILTER P812800- P815278_LS HMC 5 11/9/23	3 UNIT	7,176,150	21,528,450
STEMPEL_TJB 24/10/23	3 PCS	80,000	240,000
PAPER CLIP WARNA_HIU 3 25/11/23	6 KTK	6,000	36,000
HECTER KANGARO_HIU 3 25/11/23	3 PCS	20,000	60,000
BUKU JURNAL_PLM 17/11/23	4 PCS	26,500	106,000
TIPE X_PLM 4/12/23	3 PCS	6,688	20,064
BINDER CLIP 280_HMC 5 18/12/23	4 KTK	30,000	120,000
PAPER CLIP WARNA_HMC 5 18/12/23	6 KTK	6,000	36,000
BINDER CLIP 155_HMC 5 18/12/23	5 KTK	12,000	60,000
1651096J00- FILTER SSY OIL_PLM 9/12/23	1 PCS	200,000	200,000
1541293J10- FILTER FUEL ASSY_PLM 9/12/23	1 PCS	165,000	165,000
MOUSE PAD_MRO 20/12/23	1 PCS	29,900	29,900
STICK NOTE KECIL_PLM 17/11/23 →ISI CUTTER KECIL_PLM 17/11/23 (R)	2 KTK	36,550	73,100

(7) koreksi tambah senilai Rp0

Mutasi Kurang pada transaksi persediaan meliputi transaksi

(1) Pemakaian; Senilai Rp1,813,549,079 berupa Transaksi pemakaian merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Pemakaian Persediaan ini berupa pemakaian Barang Konsumsi senilai Rp342,952,848 dan Pemakaian Suku Cadang Rp.1,470,596,231

(2) Transfer Keluar; Senilai Rp0

(3) Barang Usang; Senilai Rp0

(4) Barang Rusak; Senilai Rp0

(5) Penghapusan Lainnya; Senilai Rp0

(6) Strategis/ Berjaga-jaga; Senilai Rp0

(7) Penyerahan Kepada Masyarakat; Senilai Rp0

(8) Reklasifikasi Keluar; Senilai Rp27,194,124 berupa

NAMA BARANG	KUANTITAS	HARGA (RP)	NILAI (RP)
Materai_BKA 6/3/23	20 buah	10,000	200,000
MATERAI_HIU 3 28/3/23	20 PCS	11,000	220,000
AMPLOP COKLAT_NTN 24/3/23	1 PACK	38,000	38,000
MATERAI_HMC 5 9/5/23	20 PCS	11,000	220,000
PAPER CLIP WARNA_HIU 3 17/7/23	4 KOTAK	6,000	24,000
MAGNET DINDING_HMC 5 12/8/23	6 KOTAK	12,000	72,000
FILTER WATER_BKA 26/9/23	2 PCS	170,000	340,000
FILTER SUB WATER_BKA 26/9/23	2 PCS	300,000	600,000
LUCAS RELAY 4 PIN_LS HIU 17 11/9/23	3 UNIT	482,850	1,448,550
FUEL FILTER 34462- 00300_LS HMC 5 11/9/23	3 UNIT	522,810	1,568,430
OIL FILTER 32A40- 00400_LS HMC 5 11/9/23	3 UNIT	456,210	1,368,630
AIR FILTER P812800- P815278_LS HMC 5 11/9/23	3 UNIT	7,176,150	21,528,450
STEMPEL_TJB 24/10/23	3 PCS	80,000	240,000
PAPER CLIP WARNA_HIU	6 KTK	6,000	36,000

3 25/11/23			
HECTER KANGARO_HIU 3 25/11/23	3 PCS	20,000	60,000
BUKU JURNAL_PLM 17/11/23	4 PCS	26,500	106,000
TIPE X_PLM 4/12/23	3 PCS	6,688	20,064
BINDER CLIP 280_HMC 5 18/12/23	4 KTK	30,000	120,000
PAPER CLIP WARNA_HMC 5 18/12/23	6 KTK	6,000	36,000
BINDER CLIP 155_HMC 5 18/12/23	5 KTK	12,000	60,000
1651096J00- FILTER SSY OIL_PLM 9/12/23	1 PCS	200,000	200,000
1541293J10- FILTER FUEL ASSY_PLM 9/12/23	1 PCS	165,000	165,000
MOUSE PAD_MRO 20/12/23	1 PCS	29,900	29,900
STICK NOTE KECIL_PLM 17/11/23 →ISI CUTTER KECIL_PLM 17/11/23 (R)	2 KTK	36,550	73,100

(9) Koreksi Kurang. Senilai Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.15 Tanah

*Tanah
Rp34,323,074,719*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34,323,074,719 dan Rp34,323,074,719. Tidak ada Penambahan tanah pada TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	34.323.074.719
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	34.323.074.719

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Kota/Kabupaten	Provinsi	Nilai Perolehan
1	999	KAB. BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	622.877.000
2	595	KAB. BELITUNG TIMUR	BANGKA BELITUNG	247.710.000
3	896	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	192.640.000
4	25.497	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	3.801.603.000
5	1.330	KAB. BELITUNG	BANGKA BELITUNG	166.638.907
6	6.944	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	1.339.879.712
7	2.922	KAB. KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	5.668.680.000
8	19.381	KAB. NATUNA	KEPULAUAN RIAU	18.654.213.000
9	1.572	KAB. KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	3.076.404.000
10	360	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	552.429.100
				34.323.074.719

C.16 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp100,348,718,058*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp100,348,718,058 dan Rp 95,071,140,046. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	95.071.140.046
Mutasi tambah:	
Pembelian	760.351.500
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan pengguna	29.800.000
Pengembangan Nilai Aset	2.444.442.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	37.820.000
Transfer Masuk	3.508.391.378
Reklasifikasi Masuk	926.784.600
Mutasi kurang:	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(934.425.046)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(568.801.820)
Reklasifikasi Keluar	(926.784.600)
Aset Ekstrakomtabel	-
Saldo per 31 Desember 2023	100.348.718.058
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	-64.379.975.204
Nilai Buku per 31 Desember 2023	35.968.742.854

Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa :

1. Pengaktifan kembali LCD/Proyektor senilai 29,800,000 dikarenakan pada sebelumnya adalah henti guna akan tetapi kondisi barangnya baik maka sesuai inventarisasi bahwa barang tersebut sudah rusak berat. Untuk merubah kondisi baik menjadi rusak berat maka BMN tersebut harus di aktifkan dulu baru bisa dirubah kondisinya dari baik (B) menjadi rusak berat (RB) sesuai Berita acara : B.1485 /PSDKPLan.2/PL.750/V/2023 tanggal 30 mei 2023.
2. Pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp760,351,500 berupa:

Nama Barang	Jumlah	Nilai
A.C. Split	2	9064000
Air Conditioning (AC)	2	6536000
Tablet PC	1	7790000
Personal Computer	1	12197000
GPS	1	12765000
Senter	1	16539000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	25300000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	20700000
Blower	1	65490000
Pompa Air	2	125430000
Personal Komputer Lainnya	2	266700000
Peralatan Las Listrik	1	43290000
Perkakas Standard (Standard Tools)	1	54390000

Lainnya		
Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	3	1964700 0
A.C. Split	3	1056675 0
Lampu Emergency	1	1010100 0
Pompa Celup	3	1698300 0
Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	9	3962700 0
Secondary Surveillance Radar	2	2973000 00
Komputer Unit Lainnya	8	8776000 0
Sepeda Motor	2	3782000 0
Personal Computer	2	2812000 0
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	1880000 0
Bracket Standing Peralatan	2	4017000
Televisi	1	3193000
Camera Video	1	1576000 0
Air Conditioning (AC)	2	1429875 0
Microphone/Wireless MIC	1	2987000
GPS	1	9720000
JUMLAH		7603515 00

3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp37,820,000 dengan surat keterangan pencatatan Modul Asset Tetap dengan no B.2190/PSDKPLAN.2/PL.710/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 berupa koreksi nilai 2 unit sepeda motor
4. Pengembangan Nilai Aset Senilai Rp2,444,442,000 berupa Pekerjaan Repowering Speedboat Pengawas Napoleon 027 dengan nomor kontrak SP.1838/PPK/PSDKPLan.2/PL.421/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

5. Transfer Masuk senilai Rp2,694,191,378 berupa
- a. 4 unit fingerprint senilai Rp5,800,000 dari Sesditjen PSDKP dengan BAST no.4945/PSDKP.1/PL.450/IX/2023 tanggal 31 Juli 2023
 - b. 1 Unit Speedboat senilai Rp2,673,891,378 dari Sesditjen PSDKP dengan BAST no 6757/PSDKP.1/PL.450/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022
 - c. 1 unit Laptop senilai Rp.14,500,000 dari Stasiun PSDKP Cilacap dengan BAST no B.1721/PSDKPSta.1/PL.450/VIII/2023.
 - d. 3 Unit Alat angkut bermotor lainnya senilai Rp.814,200,000 dari Stasiun PSDKP Pontianak dengan BAST no 1019/PSDKP.1/PL.450/XII/2023
6. Reklasifikasi Masuk senilai Rp926,784,600 dengan surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap no B 2215/PSDKPLan.2/PL.710/VIII/2023 tanggal 9 agustus 2023 berupa

Nama Barang	Nilai
Alat Dapur Lainnya	2.400.000
Alat Dapur Lainnya	2.400.000
Alat Selam Seet	8.468.900
Camera Video	1.700.000
Compressor Udara	6.800.000
Compressor Udara	4.700.000
Compressor Udara	10.000.000
Compressor Udara	98.000.000
Genset	94.250.000
Genset	14.800.000
Genset	512.630.000
Jet Pump	1.469.000
Jet Pump	25.000.000
Lap Top	12.500.000
Lap Top	10.970.000
Mesin Absensi	18.500.000
	926.784.600

Mutasi Kurang berupa:

1. Penghentian Aset dari penggunaan senilai Rp934,425,046 sesuai Berita acara : B.1485 /PSDKPLan.2/PL.750/V/2023 tanggal 30 mei 2023 berupa :

URAIAN	KUANTITAS	NILAI
2	4	5
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	236	934.425.046
Portable Compressor	1	4.700.000
Sepeda Motor	1	15.522.000
Rol Meter	2	709.500
Vertikal Wind Speed	1	5.000.000
Lemari Kayu	4	3.173.500
Filing Cabinet Besi	1	2.770.350
CCTV - Camera Control Television System	1	49.850.000
Papan Visual/Papan Nama	2	9.636.000
Peta	3	1.080.000
Alat Penghancur Kertas	1	3.597.000
Mesin Absensi	4	10.600.000
Alat Pengaman / Sinyal	1	467.500
LCD Projector/Infocus	1	29.800.000
Meja Kerja Kayu	35	57.548.000
Kursi Besi/Metal	13	7.711.000
Tempat Tidur Besi	12	49.515.000
Tempat Tidur Kayu	2	5.819.000
Meja Makan Kayu	1	3.518.000
Alat Pembersih Lainnya	2	5.500.000
Lemari Es	1	5.500.000
A.C. Split	17	77.352.150
Exhause Fan	1	2.500.000
Cold Storage (Alat Pendingin)	1	851.400
Reach In Frezzer	1	4.576.000
Rice Cooker (Alat Dapur)	2	900.000
Alat Dapur Lainnya	4	1.887.272
Televisi	6	21.813.200
Dispenser	1	1.925.000
Handy Cam	1	6.957.500
Jemuran	1	550.000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8	2.508.000
Alat Rumah Tangga Lainnya	10	14.610.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	25.232.400
Camera Under Water	3	31.046.000
Camera Digital	2	9.454.000
Teropong/Keker	3	18.561.400
GPS Receiver	3	29.755.000

Handy Talky (HT)	8	17.974.000
Telepon Satelit	1	39.490.000
Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	2	23.000.000
Mesin Sandi dan Kelengkapannya	3	6.681.819
Condensor (Alat Laboratorium Umum)	1	5.500.000
TV Monitor	1	14.091.000
Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	2	787.930
P.C Unit	2	18.226.000
Lap Top	13	106.005.000
Note Book	1	13.548.700
Tablet PC	7	48.434.400
Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	49.149.525
Modem	2	836.000
Mobile Modem GSM/ CDMA	3	2.145.000
Teropong (Optik)	2	8.382.000
Alat Selam Seet	2	54.395.000
Tas Laptop, Kedap Air Untuk Membawa Laptop	1	605.000
Treadmill	1	2.677.500
		934.425.046

2. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp530,981,820 sesuai dengan Surat keterangan koreksi no1503/PSDKPLan.2/PL.750/V/2023 berupa Nilai berkurang tersebut diatas berubah menjadi Barang persediaan Berupa Suku Cadang Speed Boat 027.

3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp37,820,000 dengan surat keterangan pencatatan Modul Asset Tetap dengan no B.2190/PSDKPLAN.2/PL.710/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 berupa koreksi nilai 2 unit sepeda motor.

4. Reklasifikasi Keluar senilai Rp926,784,600 dengan surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap no B 2215/PSDKPLan.2/PL.710/VIII/2023 tanggal 9 agustus 2023 Berupa:

Reklasifikasi		Perolehan
Keluar		Nilai
Nama Barang		Nilai
Senter Bawah Air		2.400.000
Senter Bawah Air		2.400.000
Peralatan Selam Lainnya		8.468.900
Flexible Video Camera		1.700.000
Transportable Compressor		6.800.000
Portable Compressor		4.700.000
Compressor		10.000.000

Lainnya	
Kompresor Selam	98.000.000
Mesin Diesel	94.250.000
Mesin Diesel	14.800.000
Mesin Diesel	512.630.000
Engine Washer Water Spray	1.469.000
Pompa Lainnya	25.000.000
Komponen/Alat Pengolah Data	12.500.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Komputer unit lainnya	10.970.000
Fingerprint Livescanner	18.500.000
	926.784.600

C.17 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp37,770,160,640*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp37,770,160,640 dan Rp38,585,284,356 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	38.585.284.356
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Transfer Masuk	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggu	350.241.960
Penambahan Nilai Aset Gedung	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Revaluasi BMN	-
Transfer Keluar	(1.165.365.676)
Saldo per 31 Desember 2023	37.770.160.640
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-8.650.099.482
Nilai Buku per 31 Desember 2023	29.120.061.158

- Mutasi Tambah Gedung Bangunan berupa : Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif berupa Bangunan lain Stiger Speedboat dengan BA Inventaris BMN dengan no B.3153/PSDKPLan.2/PL.760/X/2023. Senilai Rp 350.241.960
- Mutasi Kurang Gedung Bangunan berupa : Transfer Keluar Bangunan Gedung Kantor dan Mess Satwas Natuna ke Mahkamah Agung RI dengan BAST No.201/SJ/PL.750/VIII/2023 dan No 1/BUA.4/BA.PL1.2/VIII/2023. Senilai Rp 1,165,365,676

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp39,186,824,575*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 39,186,824,575 dan Rp39,037,038,575 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	39.037.038.575
Mutasi tambah:	-
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0
Revaluasi BMN	-
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-
Belanja Modal Jaringan	149.786.000
Mutasi kurang:	-
Revaluasi BMN	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	39.186.824.575
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(17.756.007.780)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	21.430.816.795

Mutasi Tambah Jaringan berupa : Belanja Modal Jaringan Listrik Darat Senilai Rp149.786.000 dengan BAST No.1707/PPK/PSDKP.Lan2/2023.

C.19 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp85,287,400.

Mutasi kurang atas KDP ini untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	85.287.400
Mutasi tambah:	0
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	0
Alsin dalam Pengerjaan	0
Penambahan Nilai Alsin	
Perolehan/Penambahan KDP Gedung Bangunan	
Mutasi kurang:	-85.287.400
KDP Menjadi Aset	0
Koreksi Nilai KDP	0
Penghapusan KDP	-85.287.400
Hibah (Keluar)	0
Saldo per 30 Juni 2023	0

Mutasi Kurang Kontruksi dalam Pengerjaan berupa :

Penghapusan KDP senilai Rp85,287,400 dengan no 432/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 Tanggal 27 Desember 2023 berupa

1. Perencanaan Revitalisasi Bangunan Pagar Pangkalan PSDKP Batam senilai Rp 4.741.600,
2. Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung di Pangkalan PSDKP Batam Senilai Rp58,700,800
3. Perencanaan Pembangunan Pagar di Wilker Tanjung Balai Karimun senilai Rp 21,845,000,

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp 90,786,082,466)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp 90,786,082,466) dan (Rp 79,467,361,718) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	100.348.718.058	64.379.975.204	35.968.742.854
2	Gedung dan Bangunan	37.770.160.640	8.650.099.482	29.120.061.158
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.186.824.575	17.756.007.780	21.430.816.795
4	Aset Tetap Lainnya		0	0
	Akumulasi Penyusutan	177.305.703.273	90.786.082.466	86.519.620.807

C.22 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.23 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp 0*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp 1,267,919,423. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Terdapat mutasi tambah Berupa Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp.934,425,046 yang telah diajukan permohonan penghapusan BMN Penjelasan mutasi tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebanyak 281 unit BMN senilai Rp 941.700.046 dengan rincian sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor : B.1485/PSDKPLan.2 /PL.750/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.yang terdiri barang Intrakompatabel senilai Rp.934,425,046 dan barang Ekstrakompatabel senilai Rp7.275.000

Penjelasan mutasi kurang BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Peralatan dan Mesin dengan Harga dibawah 100 juta sebanyak 291 unit senilai Rp 1.829.577.509 dengan rincian sesuai dengan surat nomor : B.4490/PSDKP.1/PL. 75/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam; yang terdiri barang Intrakompatabel senilai Rp.1.822,302,509 dan barang Ekstrakompatabel senilai Rp7.275.000
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp.380.041.960 berupa Infocus senilai Rp29.800.000 dan bangunan lainnya senilai Rp 350.241.960

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.267.919.423
Mutasi tambah:	934.425.046
Penghentian Aset dari Penggunaan	934.425.046
Mutasi kurang:	-2.202.344.469
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-1.822.302.509
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan peng	-380.041.960
Saldo per 31 Desember 2023	0

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp1,058,709,169) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-	1.058.709.169
Mutasi tambah:		1.992.632.233
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan		1.796.075.709
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan peng		196.556.524
Mutasi kurang:	-	933.923.064
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	929.666.711
Penyusutan Aset tetap	-	4.256.353
Saldo per 31 desember 2023		-

C.25 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp56.722.910

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp56.722.910 dan Rp 37,419,675. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga:

- Belanja Barang yang Harus dibayar senilai Rp56.722.910 yang merupakan Tagihan Listrik, Telepon dan Air Bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024.

C.27 Utang yang Belum ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Utang yang ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.30 Ekuitas

*Ekuitas
Rp 121,943,831,378*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp121,943,831,378 dan Rp128,944,174,846. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBP
Rp2,471,289,962*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2,471,289,962 dan Rp48,417,600.

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	% NAIK (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya	2419402157	0	100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3481797	0	100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	48406008	48417600	-0,02%
JUMLAH	2471289962	48417600	5004,11%

Adapun Rincian Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Januari 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 9B89261QUQF2OQ8G tanggal 31 Maret 2023
2. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Februari 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN F945F55DF01P1NB3 tanggal 1 Mei 2023
3. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Maret 2023 senilai Rp.3,522,950 dengan no NTPN D2A4C48VV5G28LU6 tanggal 24 Mei 2023
4. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan April 2023 senilai Rp.3,778,392 dengan no NTPN 9027F55DF04S3MKT tanggal 5 Juni 2023.
5. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 378,444,968 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif Kepada PT. Pulau Bawah dengan nomor Surat B.290/DJPSDKP/PW.240/IV/2023 tanggal 10 April 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 6BC1A6U8EL3RJ1ER Tanggal 12 April 2023.

6. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 181,116,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Bintang TJandra Makmur dengan nomor Surat B.466/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 658090N9VR94KOKG Tanggal 12 Juni 2023.
7. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 202,272,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Hasil Laut dengan nomor Surat B.464/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 3265E48VV5IM8MO0 Tanggal 12 Juni 2023.
8. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 160,734,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Maju Jaya Bersama dengan nomor Surat B.465/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 9BFD37QLUFS7SKQ8 Tanggal 12 Juni 2023.
9. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 136,998,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Apel Hijau dengan nomor Surat B.463/DJPSDKP/PW.340/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 658090N9VR94KOKG Tanggal 10.
10. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 190,404,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Apel Hijau 8 dengan nomor Surat B.476/DJPSDKP/PW.110/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN FD8BB0N9VR95NC42 Tanggal 13 Juni 2023.
11. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 58,815,010 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT. Utama Resort Batam dengan nomor Surat B.479/DJPSDKP/PW.230/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN B61118N3EAEMG2C1 Tanggal 15 Juni 2023.
12. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp65,895,390 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Tri Tunas Unggul dengan nomor Surat B.700/DJPSDKP/PW .230/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 5BBFA7QLUFV9074L Tanggal 14 Juli 2023.

13. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Mei 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 6F8353CIFB3FORM7 tanggal 18 Juli 2023.

14. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juni 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN DF0121JNFM1HU655 tanggal 14 Agustus 2023.

15. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp271,064,666 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT. Dirgantara Inti Abadi dengan nomor Surat B.764/DJPSDKP/PW .210/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN E1F390N9VRF08LLS Tanggal 15 Agustus 2023.

16. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 89,583,528 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Indo Asean dengan nomor Surat B.811/DJPSDKP/PW .230/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 7A0FB3CIFB6LIHML Tanggal 26 Agustus 2023.

17. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 323,647,555 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Tritunas Sinar Benua dengan nomor Surat B.798/DJPSDKP/PW .210/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 6FFEB2G4VGK6SIU4 Tanggal 28 Agustus 2023.

18. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp3,481,797, Telah dibayarkan dengan no SP2D 231371301005706 Tanggal 31 Agustus 2023 dan SPM No 593. Berupa denda keterlambatan Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Kapal Pengawas sesuai BAST no BA.2388/PSDKPLan.2/PL.430/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 BAP no BA.2389/PSDKPLa n.2/PL.430/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp.348,179,694 kepada CV.Spectra Gemilang.

19. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 45,309,600 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada Budiyanto dengan nomor Surat B.776/DJPSDKP/PW .240/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 744A47QLUG52CRTE Tanggal 12 September 2023. Bukti penerimaan Negara Denda Administratif a.n Budiyanto sebelum nya di bayarkan dengan akun 425629 dikarenakan akun penerimaannya salah,maka telah dikoreksi menjadi akun 425839 dengan Nota koreksi no 137/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

20. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juli 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN CAD863CIFB98L35J tanggal 13 September 2023.
21. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 27,000,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM.TIRTA BAKTI dengan nomor Surat B.944/DJPSDKP/PW .110/VIII/2023 tanggal 29 September 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 8725548VV5S44KI0 Tanggal 29 September 2023.
22. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Agustus 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN EFA9561QUR3GPG2B tanggal 16 Oktober 2023.
23. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan September 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 9A95D55DF0JPPMAV tanggal 6 November 2023.
24. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Oktober 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN B42178N3EATK58SP tanggal 15 November 2023.
25. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan November 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN FCA9461QUR9BP5HI tanggal 12 Desember 2023.
26. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Desember 2023 senilai Rp.4,033,834 dengan no NTPN 335FA61QUR9D0U26 tanggal 14 Desember 2023.
27. Pendapatan dari Sewa Rumah Pendapatan dari sewa tanah,Gedung dan bangunan Bulan Maret dan April 2023 (kamar kosong) senilai Rp.766,326 dengan no NTPN A19CD8N3EB0I8OV7 tanggal 14 Desember 2023.
28. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 20,000,000 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM SETIAWAN II dengan nomor Surat B.928/DJPSDKP/PW .320/IX/2023 tanggal 22 September 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 5AF836U8ELJ72N9N Tanggal 22 September 2023.
29. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp181,924,800 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada PT.Pulau Bintang Emas dengan nomor Surat B.1017/DJPSDKP/PW.210/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN E01551JNFM7QKGO9 Tanggal 26 Oktober 2023.

30. Pendapatan Denda Administratif senilai Rp 86,192,640 sesuai dengan Surat Pengenaan Denda Administratif kepada KM. Hasil Lautan dengan nomor Surat B.1180/DJPSDKP/PW.110/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, Telah dibayarkan dengan no NTPN 0EB9955DF0N4RQQP Tanggal 18 Desember 2023.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11,226,144,634 dan *Beban Pegawai Rp11,226,144,634* Rp11,009,548,449. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai mengalami kenaikan senilai 1,97%. Hal ini disebabkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 Realisasi diperuntukkan ASN Pangkalan PSDKP Batam yang berjumlah 102 orang Belanja pegawai TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 1,97 persen dari TA 2022. disebabkan ada tambahan Pegawai P3K sebanyak 12 orang dan mulai dibayarkan belanja pegawainya di bulan agustus 2023.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gai Pokok PNS	3.955.628.700	3.977.683.184	(0,55)
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.472	67.357	(5,77)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	336.835.620	335.698.994	0,34
Beban Tunj. Anak PNS	106.935.500	101.447.327	5,41
Beban Tunj. Struktural PNS	23.940.000	23.220.000	3,10
BebanTunj. Fungsional PNS	145.670.000	149.045.000	(2,26)
Beban Tunj. PPh PNS	1.264.300	1.287.475	(1,80)
Beban Tunj. Beras PNS	290.186.940	292.456.340	(0,78)
Beban Uang Makan PNS	379.674.500	424.021.000	(10,46)
BebanTunjangan Umum PNS	149.085.000	153.985.000	(3,18)
Beban Uang Lembur	249.786.000	266.105.000	(6,13)
Beban Gaji Pokok PPPK	145.968.000	0	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.547	0	100,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.108.400	0	100,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.359.728	0	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14.400.000	0	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	11.007.840	0	100,00
Beban Uang Makan PPPK	20.160.000	0	100,00
Beban Uang Lembur PPPK	16.557.000	0	100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.170.210.289	5.284.531.772	(2,16)
PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	195.300.798	0	100,00
Jumlah Beban Kotor	11.226.144.634	11.009.548.449	1,97
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	-
Pengembalian Beban Tunjangan Struktural	0	0	-
Pengembalian Beban uang Makan	0	0	-
Pengembalian Beban Tunjangan Umum	0	0	-
Jumlah Beban Bersih	11.226.144.634	11.009.548.449	1,97

Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

TA 2023

URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
Gaji Pokok PNS	3.955.628.700	3.955.628.700	0
Pembulatan Gaji PNS	64.561	63.472	1.089
Tunj. Suami/Istri PNS	339.151.580	336.835.620	2.315.960
Tunj. Anak PNS	106.935.500	106.935.500	0
Tunj. Struktural PNS	23.940.000	23.940.000	0
Tunj. Fungsional PNS	145.670.000	145.670.000	0
Tunj. PPh PNS	1.264.300	1.264.300	0
Tunj. Beras PNS	290.186.940	290.186.940	0
Uang Makan PNS	380.063.000	379.674.500	388.500
Tunjangan Umum PNS	149.085.000	149.085.000	0
Uang Lembur	249.786.000	249.786.000	0
Gaji Pokok PPPK	145.968.000	145.968.000	0
Pembulatan Gaji PPPK	2.547	2.547	0
Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.108.400	11.108.400	0
Tunjangan Anak PPPK	2.359.728	2.359.728	0
Tunjangan Fungsional PPPK	14.400.000	14.400.000	0
Tunjangan Beras PPPK	11.007.840	11.007.840	0
Beban Uang Makan PPPK	20.160.000	20.160.000	0
Beban Uang Lembur PPPK	16.557.000	16.557.000	0
(Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.170.363.699	5.170.210.289	153.410
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	195.300.798	195.300.798	
Jumlah	11.229.003.593	11.226.144.634	2.858.959

Adapun penjelasan selisih belanja pegawai dengan beban pegawai di TA 2023 yaitu: Pengembalian Uang Makan senilai Rp388,500, Pengembalian Tukin Senilai Rp153,410 dan Pengembalian Pembulatan senilai Rp1,089 Serta Pengembalian Tunjangan Suami/Istri senilai Rp2,315,960.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp343,862,848 dan Rp 516,187,537. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan mengalami penurunan 33,38 % pada TA 2023.

*Beban
Persediaan
Rp343,862,848*

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	343.862.848	516.187.537	-33,38
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0,00
Beban Persediaan Bahan baku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	343.862.848	516.187.537	-33,38

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp36,741,334,498*

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36,741,334,498 dan Rp25,966,143,224. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa TA 2023 mengalami Kenaikan 41,50 % dari TA 2022 disebabkan Adanya kenaikan signifikan dari Beban Bahan, beban barang operasional lainnya, beban barang non operasional lainnya dan beban jasa lainnya dikarenakan sejak pada tahun anggaran 2023 pandemi covid 19 berubah status menjadi endemic, sehingga operasional berjalan dengan normal dan realisasi lebih besar dari TA 2022.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	3.563.670.962	3.517.024.927	1,33
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	254.077.000	206.198.500	23,22
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.750.550	27.377.300	(64,38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	257.189.000	253.920.000	1,29
Beban Barang Operasional Lainnya	547.487.000	207.614.000	163,70
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	51.200.000	(100,00)
Beban Bahan	28.377.828.357	18.864.337.275	50,43
Beban Honor Output Kegiatan	102.010.000	99.190.000	2,84
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.640.438.360	1.110.125.100	47,77
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Beban Langganan Listrik	705.268.527	705.283.404	(0,00)
Beban Langganan Telepon	232.052.963	232.228.105	(0,08)
Beban Langganan Air	158.888.279	105.040.308	51,26
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.398.700	10.979.300	(41,72)
Beban Jasa Konsultan	99.925.000	0	100,00
Beban Sewa	257.005.000	189.774.250	35,43
Beban Jasa Profesi	35.110.000	40.700.000	(13,73)
Beban Jasa Lainnya	494.234.800	298.071.755	65,81
Beban Jasa Penanganan Pandemi	0	47.079.000	(100,00)
Beban Aset Extrakompatabe	0	0	100,00
Jumlah	36.741.334.498	25.966.143.224	41,50

Selisih Belanja Barang dan Jasa dengan Beban

TA 2023

URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
Beban keperluan perkantoran	3.563.838.962	3.563.670.962	168.000
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	254.077.000	254.077.000	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.796.550	9.750.550	46.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	257.360.000	257.189.000	171.000
Beban Barang Operasional Lainnya	547.487.000	547.487.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Bahan	28.377.828.357	28.377.828.357	0
Beban Honor Output Kegiatan	102.010.000	102.010.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.640.438.360	1.640.438.360	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Langganan Listrik	688.674.475	705.268.527	-16.594.052
Beban Langganan Telepon	230.077.292	232.052.963	-1.975.671
Beban Langganan Air	158.108.767	158.888.279	-779.512
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.398.700	6.398.700	0
Beban Jasa Konsultan	99.925.000	99.925.000	0
Beban Sewa	257.005.000	257.005.000	0
Beban Jasa Profesi	35.110.000	35.110.000	0
Beban Jasa Lainnya	494.234.800	494.234.800	0
Beban Jasa Penanganan Pandemi	0	0	0
Beban Aset Extrakompatible	0	0	0
Jumlah	36.722.370.263	36.741.334.498	-18.964.235

Adapun penjelasan selisih belanja Barang dan Jasa dengan beban Barang dan Jasa di TA 2023 yaitu: Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran senilai Rp168,000, Pengembalian Honor Satuan Kerja Senilai Rp171,000, Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Pengiriman Surat Dinas senilai Rp46,000, Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Listrik Januari 2023 dikurang Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Listrik Januari 2024 senilai Rp35,273,395 - Rp51.867.447 = (Rp16,594,052), Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Telepon/Internet Januari 2023 dikurang Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Telepon/Internet

Januari 2024 senilai Rp2,007,110 - Rp 3.982.781 = (Rp1.975.671), Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Air Januari 2023 dikurang Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Belanja Air Januari 2024 senilai Rp93,170 - Rp872.682 = (Rp779,512)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp6,230,101,962*

Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,230,101,962 dan Rp6,876,317,511. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami penurunan 9,40 % di TA 2023, karena ada penurunan yang signifikan pada biaya kegiatan pada pemeliharaan Alsin, dan persediaan suku cadang. Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan Belanja Barang secara signifikan dari 2022 yaitu Belanja Barang Pemeliharaan Persediaan Peralatan dan Mesin (Suku cadang) sebesar 68,39 %. Hal tersebut dikarenakan Anggaran Pengadaan suku cadang lebih kecil dari tahun 2022.. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	399.581.750	144.435.000	176,65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.220.555.121	2.042.804.849	106,61
Beban Persediaan suku cadang	1.470.596.231	4.651.949.662	(68,39)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.617.900	8.190.000	41,85
Beban Pemeliharaan Jaringan	127.750.960	28.938.000	341,46
Jumlah	6.230.101.962	6.876.317.511	(9,40)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp 3,701,778,447*

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,701,778,447 dan Rp 2,889,331,299. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas sebesar 28,12 % dikarenakan pada Tahun 2023 Banyak kegiatan dilakukan secara luring karena situasi sudah normal dibanding tahun 2022

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.875.369.245	2.203.356.683	30,50
Beban Perjalanan Tetap	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	435.777.000	299.826.000	45,34
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	293.532.202	256.323.500	14,52
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	97.100.000	129.825.116	-25,21
Jumlah	3.701.778.447	2.889.331.299	28,12

Selisih Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas

TA 2023

URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	2.875.369.245	2.875.369.245	0
Beban Perjalanan Tetap	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	435.777.000	435.777.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	293.532.202	293.532.202	0
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	97.100.000	97.100.000	0
Jumlah	3.701.778.447	3.701.778.447	0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 10,061,836,339*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 10,061,836,339 dan Rp9,034,359,753. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan
2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.280.681.071	6.186.617.164	17,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	774.421.955	776.381.112	(0,25)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	2.002.476.960	2.055.948.873	(2,60)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	15.412.604	-
Jumlah Penyusutan	10.057.579.986	9.034.359.753	11,33
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	4.256.353	-	-
Jumlah Amortisasi	4.256.353	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.061.836.339	9.034.359.753	11,37

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp.101,220,311)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	9.523.889	9.553.671	100,00
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	770.000	808.988	(4,82)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-111.514.200	-4.840.937	0,00
Beban kegiatan non operasional lainnya	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-101.220.311	5.521.722	(1933,13)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp9,523,889 berupa :

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 2 unit Perahu Karet dan 1 Unit Primary Surveillance Radar dengan Risalah Lelang no RL 57/11/2023 Tanggal 2 Februari 2023 dengan NTPN 14C9261QUQB8NVQK Senilai Rp. 755,000 tanggal 4 Februari 2023

2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 1 (satu) Paket Peralatan Selam dengan Risalah Lelang no RL 7/16/2023 Tanggal 18 Januari 2023 dengan NTPN A28F38N3E9VVAIEH Senilai Rp. 1,845,000 Tanggal 20 Januari 2023

3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 808/11/2023 tanggal 14 November 2023 dengan NTPN 9F6232G4VGSTAJ0A tanggal 15 November 2023 senilai Rp600,000

4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 2 unit papan nama,2 unit mesin absensi,1 unit infocus,2 unit tempat tidur besi,8 unit ac split,1 unit alat dapur, 1 unit HT, 1 unit alat komunikasi radio, 3 unit laptop, 3 unit tablet pc,4 unit printer ,2 unit modem dengan no RL 1163/14/2023 tanggal 28

November 2023 dengan NTPN 3035961QUR6RTLM2 tanggal 29 November 2023 senilai Rp3,700,000

5. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 479/16/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan NTPN BA86E48VV64C8VBE tanggal 5 Desember 2023 senilai Rp1,055,999

6. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 1283/13/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan NTPN 963E01JNFMD8A2N5 tanggal 7 Desember 2023 senilai Rp1.567.890.

Pendapatan dari Kegiatan non operasional lainnya berupa :

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pengembalian Pembayaran Uang makan Desember yang sudah dibayarkan di bulan Desember 2022 a.n Reza Puspita Widagdo, dengan no NTPN E6E5F55DEVS8HERL tanggal 16 Maret 2023 senilai Rp770,000,000 dimana pegawai sudah mengundurkan diri per Desember 2022.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Senilai Rp111,514,200 Berupa :

1. Beban Pelepasan Aset Non Lancar berupa Penghapusan KDP senilai Rp 85.287.400
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar dari Penjualan Alsin Berupa Surveylance Primary Radar senilai Rp21,200,000
3. Beban Pelepasan Aset Non Lancar dari Penjualan Alsin Berupa Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil senilai Rp2,100,000
4. Beban Pelepasan Aset Non Lancar dari Penjualan Alsin Berupa Alat Pembersih Lainnya senilai Rp1,100,000
5. Beban Pelepasan Aset Non Lancar dari Penjualan Alsin Berupa Lemari Es senilai Rp1,100,000
6. Beban Pelepasan Aset Non Lancar dari Penjualan Alsin Berupa UPS, Teropong, Alat Kesehatan lainnya, dan Jangka Sorong senilai Rp726,800

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp 128,944,174,846

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128,944,174,846 dan Rp 126,330,270,143

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp65,934,989,077)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp65,934,989,077) dan (Rp56,237,948,451)). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Persediaan/Aset
Rp0*

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*KoreksiAset
Tetap Non
Revaluasi
Rp 388,680,745*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp388,680,745 dan (Rp5,360,641,037). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp388,680,745 berupa koreksi nilai bertambah kapitalisasi aset pada Speedboat Napoleon 027 yang diinput per Tahun 2022 senilai Rp530.981.820,00 berupa sucad pekerjaan GO yang tidak jadi dipasang, kemudian dikoreksi nilai berkurang senilai Rp530.981.820,00 sehingga terdapat penyusutan Senilai (Rp142,301,075)

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp58,545,964,864*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp58,545,964,864 dan Rp64,212,494,191. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.481.583.851)
Ditagihkan ke Entitas Lain	61.067.454.700
Transfer Masuk	795.074.218
Transfer Keluar	(834.980.210)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	58.545.964.857

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp2,481,583,851) sedangkan DKEL sebesar Rp 61,067,454,707.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Masuk senilai Rp795,074,218 dan Transfer Keluar senilai Rp834,980,210

Rincian Transfer Masuk di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai buku yang merupakan nilai perolehan di kurang akumulasi penyusutan berupa :

- Transaksi Transfer Masuk dari Stasiun PSDKP Cilacap berupa 1 unit Lap Top Komputer) senilai Rp 14.500.000 sesuai BAST Nomor : B.1721/PSDKPSta.1/PL.45/VIII /2023 setelah dikurangi penyusutan mempunyai nilai buku Rp9,625,000

- Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Penanganan Pelanggaran sebanyak 4 unit Finger Printer Time and Attendance Acces Control System senilai Rp 5.800.000 sesuai BAST nomor : B.4945/PSDKP.1/PL.450/IX/2023.setelah dikurangi penyusutan mempunyai nilai buku Rp5,220,000

- Tranfer Masuk dari Stasiun PSDKP Pontianak 3 unit Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya senilai Rp 814.200.000 sesuai BAST Nomor : 1019/PSDKP.1/PL.450/XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023; setelah dikurangi penyusutan mempunyai nilai buku Rp244,260,000

- Tranfer Masuk dari UAPKPB Direktorat POA , 1 unit Speed Boat / Motor Tempel RIB X 08 senilai Rp Rp 2.673.891.378 sesuai BAST Nomor : B. 6757/PSDKP.1/PL.450/XII /2022 tanggal 5 Desember 2022; setelah dikurangi penyusutan mempunyai nilai buku Rp536,531,718

Rincian Transfer Keluar di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai buku yang merupakan nilai perolehan di kurang akumulasi penyusutan berupa :

- Transaksi reklasifikasi keluar 1 unit Bangunan Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp 620.333.098 sesuai Kepmen KP Nomor : 1032/KEPMEN-KP /SJ /PL.750 /2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tanggal 20 November 2023. setelah dikurangi penyusutan mempunyai nilai buku Rp 465.163.465

- Transaksi reklasifikasi keluar 1 unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai Rp 545.032.578 sesuai Kepmen KP Nomor : 1032/KEPMEN-KP /SJ /PL.750 /2023 Tentang Penghapusan

Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tanggal 20 November 2023. setelah dikurangi penyusutan mempunyai nilai buku Rp 369.816.745

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp121,943,831,378

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 121,943,831,378 dan Rp128,944,174,846

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Informasi Pengelolaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Pangkalan PSDKP Batam Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Total
1	Tanah	34.323.074.719	0	34.323.074.719
2	Peralatan dan Mesin	99.266.377.010	1.140.525.648	100.348.718.058
3	Gedung dan Bangunan	37.770.160.640	0	37.770.160.640
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.037.038.575	149.786.000	39.186.824.575
5	Aset Tetap Lainnya			-
	Jumlah	210.396.650.944	1.290.311.648	211.628.777.992

- Selama periode 31 Desember 2023 Satker Pangkalan PSDKP Batam telah menerima SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sebanyak 2 SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang dan Pengelola Barang sejumlah 35 unit senilai Rp 507.139.670 Dengan rincian sebagai berikut :
- SK PSP sebanyak 2 NUP Berupa Tanah senilai Rp 359.278.907 sesuai SK nomor: 156/KM.6/ KNL.0304/2023 tanggal 15 November 2023;
- SK PSP sebanyak 33 NUP berupa Peralatan dan Mesin dengan harga perolehan dibawah 100 juta senilai Rp 147.860.763 sesuai SK nomor : 1118/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Jaminan pelaksanaan Pekerjaan Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 027

- Terdapat jaminan pelaksanaan Pekerjaan Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 027 berdasarkan Surat Penunjukan Jasa Lainnya Nomor: B.1819/PSDKPLan.2/PL.460/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bank Mandiri senilai Rp122.222.100,00 dengan masa berlaku dari 26 Junis.d. 23 Oktober 2023 (120 hari kalender) dengan no jaminan pelaksanaan BG16423216162 tanggal 26 Juni 2023.

- Terdapat jaminan pelaksanaan Pekerjaan Docking KP.Hiu 03 dan KP.Hiu Macan 05 Oleh PT. Palindo Marine berdasarkan Surat Penunjukan Jasa Nomor: B.1310/PSDKPLan.2/PL.460/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 dari Bank BNI senilai Rp101.404.650,00 dengan masa berlaku dari 26 Mei s.d. 18 November 2023 (180 hari kalender) dengan no jaminan pelaksanaan 23/OJR/075/6869/SELASA tanggal 23 Mei 2023
- Terdapat jaminan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Kapal Pengawas Oleh CV. Spectra Gemilang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: B.1079/PPK/PL.400/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dari Bank BRI senilai Rp23.381.928,00 dengan masa berlaku dari 18 April s.d. 16 Juli 2023 dengan no jaminan pelaksanaan 0034023040010866 tanggal 17 April 2023

Realisasi Pengadaan Belanja Bahan Bakar Minyak

Pada TA 2023 terdapat 1 kontrak pengadaan bahan bakar minyak yaitu kontrak tanggal 13 januari 2023 dengan no kontrak T.218/PSDKPLAN.2/PL.420/I/2023 senilai Rp. 24,965,264,000 akan direncanakan sebanyak 20 termin dengan realisasi belanja pengadaan bahan bakar minyak senilai Rp 24,965,264,000 (20 Termin) atau 100 %. pada TA 2023 telah direalisasi sebanyak 20 termin dari kontrak, ada pun rincian realisasi pengadaan BBM yaitu :

1. Pembayaran Belanja Barang Termin I Pengadaan BBM Senilai Rp838,860,000 dengan no SP2D 231371303000172 tanggal 1 Februari 2023.
2. Pembayaran Belanja Barang Termin II Pengadaan BBM Senilai Rp516,230,000 dengan no SP2D 231371303000496 tanggal 24 Februari 2023
3. bayaran Belanja Barang Termin III Pengadaan BBM Senilai Rp 344,190,000 dengan no SP2D 231371303000894 tanggal 20 Maret 2023
4. Pembayaran Belanja Barang Termin IV Pengadaan BBM Senilai Rp1,046,286,000 dengan no SP2D 231371303001021 tanggal 29 Maret 2023.
5. Pembayaran Belanja Barang Termin V Pengadaan BBM Senilai Rp1,682,224,000 dengan no SP2D 231371303001216 tanggal 6 April 2023.

6. Pembayaran Belanja Barang Termin VI Pengadaan BBM Senilai Rp179,410,000 dengan no SP2D 231371303001749 tanggal 11 Mei 2023.
7. Pembayaran Belanja Barang Termin VII Pengadaan BBM Senilai Rp1,485,282,000 dengan no SP2D 231371303001951 tanggal 26 Mei 2023.
8. Pembayaran Belanja Barang Termin VIII Pengadaan BBM Senilai Rp720,514,000 dengan no SP2D 231371303002303 tanggal 15 Juni 2023.
9. Pembayaran Belanja Barang Termin IX Pengadaan BBM Senilai Rp937,200,000 dengan no SP2D 231371303002492 tanggal 26 Juni 2023.
10. Pembayaran Belanja Barang Termin X Pengadaan BBM Senilai Rp 1,644,500,000 dengan no SP2D 231371303002637 tanggal 6 Juli 2023.
11. Pembayaran Belanja Barang Termin XI Pengadaan BBM Senilai Rp 2,341,735,000 dengan no SP2D 231371303003056 tanggal 28 Juli 2023.
12. Pembayaran Belanja Barang Termin XII Pengadaan BBM Senilai Rp 1,067,660,000 dengan no SP2D 231371303003525 tanggal 23 Agustus 2023.
13. Pembayaran Belanja Barang Termin XIII Pengadaan BBM Senilai Rp 1,248,060,000 dengan no SP2D 231371303004005 tanggal 21 September 2023.
14. Pembayaran Belanja Barang Termin XIV Pengadaan BBM Senilai Rp.1,094,060,000 dengan no SP2D 231371303004311 tanggal 9 Oktober 2023.
15. Pembayaran Belanja Barang Termin XV Pengadaan BBM Senilai Rp 1,820,364,000 dengan no SP2D 231371303004670 tanggal 27 OKtober 2023.
16. Pembayaran Belanja Barang Termin XVI Pengadaan BBM Senilai Rp 719,180,000 dengan no SP2D 231371303004988 tanggal 14 November 2023.
17. Pembayaran Belanja Barang Termin XVII Pengadaan BBM Senilai Rp 2,164,742,500 dengan no SP2D 231371303005121 tanggal 21 November 2023.
18. Pembayaran Belanja Barang Termin XVIII Pengadaan BBM Senilai Rp 1,761,155,000 dengan no SP2D 231371303005485 tanggal 5 Desember 2023.
19. Pembayaran Belanja Barang Termin XIX Pengadaan BBM Senilai Rp 908,763,000 dengan no SP2D 231371303005765 tanggal 11 Desember 2023.
20. Pembayaran Belanja Barang Termin XX Pengadaan BBM Senilai Rp 2,444,848,500 dengan no SP2D 231371303006072 tanggal 22 desember 2023.

Progres Pengadaan Barang dan Jasa

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah Rp0. KDP pada I TA 2022 sudah dihapuskan dengan no surat penghapusan KDP 432/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 Tanggal 27 Desember 2023 berupa :

1. Perencanaan Revitalisasi Bangunan Pagar Pangkalan PSDKP Batam senilai Rp 4.741.600,
2. Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung di Pangkalan PSDKP Batam Senilai Rp58,700,800
3. Perencanaan Pembangunan Pagar di Wilker Tanjung Balai Karimun senilai Rp 21,845,000,

Penghapusan atas Aset Lainnya

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 2 unit Perahu Karet dan 1 Unit Primary Surveillance Radar dengan Risalah Lelang no RL 57/11/2023 Tanggal 2 Februari 2023 dengan NTPN 14C9261QUQB8NVQK Senilai Rp. 755,000 tanggal 4 Februari 2023
- b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 1 (satu) Paket Peralatan Selam dengan Risalah Lelang no RL 7/16/2023 Tanggal 18 Januari 2023 dengan NTPN A28F38N3E9VVAIEH Senilai Rp. 1,845,000 Tanggal 20 Januari 2023.
- c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 808/11/2023 tanggal 14 November 2023 dengan NTPN 9F6232G4VGSTAJ0A tanggal 15 November 2023 senilai Rp600,000
- d. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 2 unit papan nama,2 unit mesin absensi,1 unit infocus,2 unit tempat tidur besi,8 unit ac split,1 unit alat dapur, 1 unit HT, 1 unit alat komunikasi radio, 3 unit laptop, 3 unit tablet pc,4 unit printer ,2 unit modem dengan no RL 1163/14/2023 tanggal 28 November 2023 dengan NTPN 3035961QUR6RTLM2 tanggal 29 November 2023 senilai Rp3,700,000

- e. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 479/16/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan NTPN BA86E48VV64C8VBE tanggal 5 Desember 2023 senilai Rp1,055,999.
- f. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 paket BMN kondisi rusak berat dengan no RL 1283/13/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan NTPN 963E01JNFMD8A2N5 tanggal 7 Desember 2023 senilai Rp1.567.890

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : Kep.20/KPA-Lan.2/KP.131/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Honorarium TIM Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam TA 2023 adalah:

Penanggung Jawab	: Fahrur Rozi
Koodinator	: Tri Warni
Petugas	: Hibrid Rizkjiyanu

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.14/MEN/KU.611/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Tentang Penunjukan KPA Pada Satker Daerah (UPT) dan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor Kep.27/KPA-LAN.2/KU.611//2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Pejabat PPK dan PPSPM serta Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor Kep.08/KPA-LAN.2/KU.611/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan Kep.41/KPA-LAN.2/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam.

Daftar nama pengelola anggaran Pangkalan PSDKP Batam

1. Nama : Turman Hardiyanto Maha
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Nama : Muslani
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Nama : Lutfi Felanie
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Nama : Hasnul Barki
Jabatan : Pejabat Penandatanganan SPM
5. Nama : Vina Maira Sari
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
6. Nama : Fahrur Rozi
Jabatan : Bendahara Penerimaan

